BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional memiliki kekuatan tersendiri untuk membuat hakikat atas setiap interaksi yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non negara. Hal ini bertujuan agar dapat mencapai kepentingan nasional dari setiap aktor. Agar dapat mencapai hal tersebut, setiap aktor melakukan bentuk kerja sama dengan aktor lainnya, baik dalam bentuk regional, bilateral, multilateral maupun unilateral [1].

Kerja sama membawa perubahan bagi setiap hubungan antar aktor salah satunya adalah hubungan diplomatik yang merupakan sebuah instrumen dalam hubungan luar negeri yang dimiliki oleh setiap aktor. Khususnya negara, dengan pengetahuan dan teknologi, setiap negara yang memiliki kepentingan dan tujuan dapat meningkatkan hubungan dengan bentuk kerja sama serta politik luar negeri. Salah satu bentuk kerja sama terbesar pada abad ini adalah kerja sama Amerika Serikat dengan Israel yang menggemparkan dunia internasional. Kedua negara menjalin hubungan sejak tahun 1948 saat Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengakui Israel sebagai sebuah negara

[1] Ludiro Madu, "Reorientasi Politik Luar Negeri Indonesia Pada Pemerintahan Joko Widodo, 2014–2019," Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur 9, no. 2, 2014, Hal 104.

resmi[2]. Israel juga merupakan sebuah mitra Amerika Serikat yang paling terpercaya di kawasan Timur Tengah.

Dalam sebuah kerja sama antar negara pada hubungan internasional, demi mencapai tujuan masing-masing negara, tidak selalu berjalan mulus dan selalu akan selalu muncul konflik karena perbedaan kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh setiap negara. Salah satu konflik yang terjadi hingga melibatkan dunia internasional adalah, perebutan kota Jerusalem antara dua negara yang hingga saat ini merupakan dua negara konflik yaitu Palestina dan Israel.Tanah suci milik Palestina merupakan tempat yang memiliki beberapa kota yang telah disucikan oleh tiga agama besar Abrahamik yaitu Islam, Kristen dan Yahudi [3].

Tanah suci yang tidak pernah lepas dari konflik dan gejolak perang ini selalu melibatkan Israel dan Palestina yang telah terjadi berpuluh-puluh tahun lamanya hingga abad ke-20 saat ini. Sehingga masa depan tanah suci dan status Jerusalem demi perdamaian selalu dipertanyakan.Telah banyak perundingan serta resolusi untuk menuju perdamaian yang dilakukan oleh pihak Israel maupun Palestina.

Tidak hanya itu, banyak aktor-aktor internasional lainnya seperti PBB yang telah mengeluarkan resolusi PBB yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB maupun Majelis Umum PBB. Jika perdamaian tidak dapat diwujudkan di

---

[2] Silvi Oktaviani, "Kepentingan Amerika Serikat Dalam Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel Tahun 2017",Global Political Studies Journal 5, no. 1, 2021, Hal. 28–44.

[3] Nur Anis Rochmawati, "Bibel Sebagai Sumber Tafsir: Studi Inter-Tekstualitas Dalam The Holy Qur'an: Text, Translation And Commentary Karya Abdullah Yusuf Ali",(Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), Hal.31.

Jerusalem dan hal tersebut menjadi sumber terciptanya sebuah konflik maka hal ini adalah sebuah permasalahan bagi banyak pihak Jerusalem sendiri merupakan wilayah yang sebelumnya bernama Orshalem atau Orsaleem yang artinya kota penuh dengan perdamaian dalam kitab Genesis 14:18.

Tidak hanya itu, banyak aktor-aktor internasional lainnya seperti PBB yang telah mengeluarkan resolusi PBB yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB maupun Majelis Umum PBB. Jika perdamaian tidak dapat diwujudkan di Jerusalem dan hal tersebut menjadi sumber terciptanya sebuah konflik maka hal ini adalah sebuah permasalahan bagi banyak pihak [4,5,6]. Jerusalem sendiri merupakan wilayah yang sebelumnya bernama Orshalem atau Orsaleem yang artinya kota penuh dengan perdamaian dalam kitab Genesis 14:18.

Kota Jerusalem disebut sebagai salem yang berarti damai dan dalam surat yang ditulis oleh Gubernur atas kota Tel El Armana untuk Fir'aun Amen – Hotel IV yang memimpin Mesir pada abad ke-13 yakni pada tahun 1379 hingga 1362, didalamnya tertulis bahwa Jerusalem merupakan Urusalim yang artinya Kota perdamaian [7]. Kesucian kota Jerusalem yang tumbuh dari umat Yahudi dan Palestina sebagai tanah yang terpilih sehingga tanah tersebut memang untuk

---

[4] Rahman Diyanto, Problematika Palestina Dan Upaya Penyelesaiannya (Pasca-Perang Dunia I), Hadharah,Vol.13 , Juni 2019. Hal.5.

[5] Azyumardi Azra and Masykuri Abdillah, "Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia (Studi Diplomasi Pemerintahan Era Reformasi 1998-2018 Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina)," (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah , 2019. Hal.40.

[6] Qoriatus Shofiah, "Peranan Amerika Dalam Proses Perdamaian Israel Dan Palestina Tahun 1991-2002," (Jawa Timur : Universitas Jember, 2018.). Hal.37.

[7] Trias Kuncahyono, Jerusalem: Kesucian, Konflik, Dan Pengadilan" Penerbit Buku Kompas, 2008, hal.95.

umat Islam dan Kristen. Jerusalem mendapat kesucian tertingginya sejak meningkatnya keagamaan dan kembalinya Yahudi ke Israel serta bangsa barat yang antusias pada kaum Zionis..

Perdamaian pada perebutan wilayah Jerusalem oleh Palestina dan Israel menjadi lebih sulit untuk diatasi karena agama dan politik yang selalu berkaitan. Menurut sejarah kota Jerusalem, isu utama sangat berhubungan dengan agama maupun politik yang segalanya menjadi politis sehingga memicu konflik hingga permusuhan.

Jerusalem merupakan kota yang penting bagi tiga agama suci yaitu Islam, Kristen dan Yahudi, Ketiga agama tersebut memiliki kepentingan masing-masing di Jerusalem. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Jerusalem tidaklah mudah untuk diselesaikan. Konflik Israel dan Palestina tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengesampingkan status kota Jerusalem. Konflik Israel dan Palestina tetap menjadi konflik utama yang terus-menerus mempengaruhi stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Liga Bangsa Bangsa menjadi akar dari legitimasi internasional PBB yang telah mengakui bahwa hubungan sejarah kaum Yahudi dan Palestina sehingga mengklaim Palestina sebagai *national home* dari kaum Yahudi [8,9].Mandat tersebut tidak memisahkan Jerusalem dari wilayah di Palestina,

Mandat Palestina yaitu *The British Mandate for Palestine* yang diputuskan oleh Dewan Tertinggi sekutu yang berada di San Remo, Italia tanggal 19 hingga

---

[8] Hanafi Wibowo, "Mandat Liga Bangsa-Bangsa: Kegagalan Palestina Mendirikan Negara Merdeka (1920-1948),"Al-Turas , Vol.XX No.2, Juli 2013. Hal.4-5.
[9] *Ibid,* hal.10.

26 April 1920 [10] pada saat konferensi yang diadakan setelah Perang Dunia I dan keputusan tersebut disahkan Liga Bangsa Bangsa tanggal 24 Juli 1922.

Pada pembukaan Mandat Palestina dan tercantum pasal 2 tentang *national home* bagi kaum Yahudi[11,12]. Pada pasal 2 tersebut tertera bahwa Inggris mempunyai kewajiban untuk melindungi hak sipil serta agama seluruh penduduk negara Palestina dan tidak memandang suku, ras maupun agama yang dianut warga Palestina. Namun Israel hanya mementingkan isi mandat Palestina tentang *national home* sehingga melupakan isi dari pasal 2 tersebut.

Sementara itu, Palestina juga mengklaim bahwa Jerusalem atau Al-Quds merupakan ibu kota Palestina yang merdeka [13]. Palestina mengklaim Jerusalem sebagai ibukota mereka atas dasar sejarah, jumlah penduduk dan agama. Pada pidato tanggal 10 Mei 1994 di Johannesburg, Afrika Selatan oleh Yasser Arafat. Beliau merupakan mantan Presiden Otoritas Nasional Palestina yang menjabat pada tahun 1994 hingga 2004. Beliau menyatakan bahwa memberikan bukti yang telah Israel katakan bahwa Jerusalem merupakan ibukota Israel dan hal tersebut tidak benar. Jerusalem bukan sama sekali ibukota dari Israel tetapi milik Palestina [14]. Israel maupun Palestina terus melakukan saling klaim atas

---

[10] Roan Yuliana, "Konflik Arab Israel: Pengusiran Etnis Palestina Dan Diaspora Etnis Palestina," (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah , 2011.) Hal.26.

[11] Dina Y Sulaeman, Ahmadinejad on Palestine, (Depok : PT Mizan Publika, 2008). hlm.93.

[12] Rio Herlambang, "Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata Di Suriah Berdasarkan The Universal Declaration Of Human Rights (UDHR) Tahun 1948", (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2019), Hal.41.

[13] Mohamad Fadhila Arif Firmansyah, "Strategi Zionisme Ortodoks Dalam Politik Luar Negeri Israel Terhadap Palestina," Diakses dari https://eprints.umm.ac.id/25745/1/jiptummpp-gdl-fuadhasana-36569-2-babi.pdf hal.2 , (Diakses pada 10 April 2022).

[14] Eka Puji Lestari, "Strategi Shalahuddin Al-Ayyubi Dalam Mengambil Alih Yerusalem 1187-1192 M," (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), hal.73-74.

status kepemilikan Jerusalem. Hal tersebut sangat mempengaruhi stabilitas perdamaian di Timur Tengah hingga perdamaian dunia yang semakin rumit untuk menemukan penyelesaian atas konflik tersebut jika tidak menemukan penyelesaian atas klaim status Jerusalem.

Perdamaian akan terlihat jika penyelesaian terkait Jerusalem dapat diterima oleh Israel maupun Palestina[15,16]. Saat tertentu untuk menyelenggarakan sebuah perundingan antara Palestina dan Israel yang menyangkut status wilayah Jerusalem tidak selalu langsung tercapai sebuah kesepakatan sehingga tidak ada hasil sempurna atas perundingan atas perdamaian yang dilakukan.

Perundingan sering dilakukan karena Jerusalem merupakan wilayah yang suci dan sangat mengikat kedua negara sehingga baik Israel maupun Palestina tidak akan menyerah untuk mendapatkan Jerusalem.

Kedua negara mengklaim memiliki hak atas Jerusalem dan menyatakan bahwa mereka memiliki masing-masing tempat suci di Jerusalem.Konflik yang bermula sejak Perang Dunia I terjadi karena terdapat pembagian wilayah yang telah dijanjikan oleh Inggris kepada bangsa Arab dan bangsa Yahudi pada deklarasi Balfour.

Menurut Resolusi Majelis Umum PBB, No.181 pada tahun 1947 yang berisi tentang Jerusalem tidak berada dibawah kewenangan negara manapun , namun

---

[15] Erwan Komara, "Analisis Bingkai Pemberitaan Konflik Israel Di Koran Republika Menggunakan Van Dijk," Media Komunika (Jurnal Komunikasi) Universitas Sangga Buana YPKP 4, no. 2, 2019, hal.1–20.

[16] Hilmy Miftah Ardiansyah, "Penyalahgunaan Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Pencapaian Keamanan dan Perdamaian Israel-Palestina.," (Bandung : Universitas Pasundan Bandung, 2021) , hal.4-5.

berada dibawah kekuasaan internasional [17]. Dalam resolusi ditegaskan bahwa Jerusalem hanya diberikan status politik dan hukum yang dibuat terpisah, pada resolusi tersebut telah ditegaskan bahwa dengan berdirinya Palestina dan Israel telah diakui oleh Hukum Internasional sebagai negara yang masing-masing berdaulat dan diberikan kemerdekaan Penyebab munculnya konflik adalah deklarasi Balfour yang terus membuat keadaan memanas antara warga sipil Palestina dan tim kemiliteran Israel.

PBB yang merupakan organisasi internasional bagi perdamaian dunia, selalu berupaya agar terus menyelesaikan konflik antara Palestina dengan Israel.Melalui beberapa resolusinya, tahun 1947 No.181, tahun 1967 No.2421, tahun 1973 No.338 dan resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB pada tahun 1991 No.694 [18]. Resolusi yang dikeluarkan oleh PBB tidaklah cukup untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel.

Perjanjian Oslo I yang merupakan sebuah perjanjian perdamaian pertama yang dilakukan oleh Israel maupun Palestina.Perjanjian damai tersebut dilakukan dengan bantuan Amerika Serikat namun tidak berjalan dengan lancar karena perjanjian Oslo I tidak mewakili suara kelompok-kelompok yang berada di Palestina [19, 20]. Penyebab lainnya karena Amerika Serikat secara *de facto* mendorong beberapa pihak yang memiliki sengketa untuk merundingkan

---

[17] Roan Yuliana. *op. cit.* hal. 25-27.

[18] Rahmatullah, "Peran Amerika Serikat Dalam Menciptakan Perdamaian Dan Penyelesaian Konflik Israel dan Palestina" , Jurnal Ilmiah Widya Vol.3 No.1, Januari-Agustus 2015. Hal.3-4.

[19] Ladia Aisah Andrianaladia, "Keputusan Donald Trump Tentang Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibukota Israel," (Jawa Timur : Universitas Jember , 2018) hal.28.

beberapa tuntutan namun, Amerika Serikat tidak akan memberikan sanksi berat terhadap Israel yang telah melanggar perjanjian Oslo I.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menjadi mediator dalam konflik Israel dan Palestina, namun Amerika Serikat sangat dipandang tidak menjadi aktor mediator yang netral oleh masyarakat internasional karena posisi negara Israel yang merupakan salah satu aset berharga yang digunakan pada pemerintahan di Amerika Serikat.

Pada pemerintahan Amerika Serikat, kaum Yahudi juga menempati posisi penting pada pemerintahan Amerika Serikat seperti kongres, departemen luar negeri AS, Intelijen dan *National Security Council.* Hal-hal seperti ini membuat Politik Amerika Serikat dan Israel saling berhubungan.

Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Amerika serikat di kawasan Timur Tengah memperlihatkan bahwa Israel menjadi mitra khusus AS, dengan perlakuan khusus yang diberikan AS terhadap Israel yang terwujud dalam seluruh dukungan dari beberapa aspek seperti politik, ekonomi dan militer[21].

Hingga saat ini, Amerika Serikat merupakan negara mediator satu-satunya bagi Israel dan Palestina yang memiliki konflik berkepanjangan agar dapat mencapai jalan keluar atas konflik tersebut. Namun pihak pemerintah Palestina saat ini sudah tidak mempercayai Amerika Serikat lagi untuk menjadi mediator atas perdamaian konflik dengan Israel. Penyebab hal itu dapat terjadi dikarenakan pihak Amerika Serikat terlihat jelas telah memihak Israel karena

[21] Rahmatullah, *Loc.Cit.*

deklarasi dan pernyataan sepihak oleh Amerika Serikat pada saat kepemimpinan Presiden Donald Trump yang mengklaim Jerusalem sebagai ibukota dari negara Israel Deklarasi yang langsung dinyatakan oleh Donald Trump juga perencanaan pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat yang semula berada di Tel Aviv berpindah ke Jerusalem[22]. Keputusan dalam pernyataan deklarasi yang dilakukan oleh Donald Trump.

Membuat banyak negara-negara internasional menentang keputusan yang telah dikeluarkan oleh Donald Trump karena keputusan tersebut diambil secara sepihak. Hal tersebut telah menjadi pelanggaran terkait isi dari resolusi No.478 tahun 1980 yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB.

isi dari resolusi tersebut tentang pertentangan terhadap Israel agar menghidupkan kembali aturan pada hukum Israel yang terus-menerus ingin mengubah status wilayah Jerusalem.Isi dari resolusi tersebut juga mengatakan bahwa seluruh negara yang akan dan sudah mendirikan kantor untuk misi diplomatik di Jerusalem agar pindah dari Jerusalem. Resolusi tentang pertentangan tersebut telah menghimbau agar Amerika Serikat dapat mencabut kembali klaim mereka yang menyatakan bahwa Jerusalem sebagai ibukota Israel.

Konflik ini semakin memanas pada tahun 2017, bahwa keputusan yang dikeluarkan Donald Trump memiliki alasan sendiri dan mengklaim jika Trump mempunyai pendekatan baru yang bersifat resmi dengan mengakui Jerusalem

[22] Muhammad Badry Muntasyir, "Peran Aktif Amerika Serikat Era Joe Biden Dalam Konflik Palestina Dan Israel," *Jurnal PIR: Power in International Relations* 7, no. 1 (2022): 01–12.

sebagai ibukota Israel. Keputusan tersebut juga merupakan upaya diyakini oleh Trump jika perdamaian antara Israel dan Palestina dapat terwujud. Saat ini dunia internasional terus berupaya mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina yang tetap berpegang teguh pada *two state solution*.

Telah diterima oleh komunitas internasional dan dimandatkan dalam berbagai resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB [23].Banyaknya tantangan yang dihadapi untuk menjalani proses perdamaian antara kedua negara tidaklah mudah. Israel yang tetap mengambil wilayah Palestina dengan cara yang tidak pantas seperti menghancurkan rumah warga sipil Palestina dan memperluas pembangunan pemukiman di Tepi Barat.

Hal-hal perampasan wilayah tersebut merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh Israel karena bertentangan dengan Resolusi No.2334 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB[24]. Amerika Serikat yang merupakan negara aktif dan menjadi negara mediator pada proses perdamaian Israel dan Palestina. Pada masa pemerintahan Donald Trump, Amerika Serikat tidak lagi menjadi negara *honest broker* pada proses perdamaian.

Amerika Serikat dengan secara sepihak mengumumkan bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat yang sebelumnya berada di Tel Aviv pindah ke Jerusalem pada tanggal 14 Mei 2018 [25]. Pemindahan Kedutaan Besar Amerika

---

[23] Anita Rosella Koes Endah, "Resolusi Konflik Dalam Membangun Perdamaian Global: Telaah Atas Penafsiran Wahbah al-Zuhayli Dalam Tafsir al-Munir," , (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hal.35.

[24] Dalal Radwan, "Framing Palestine: News Framing of United Nations Resolutions on Palestine in US and British Newspapers, 1993-2017," 2019. hal 12-13

[25] Teguh Maulana Rizky Pohan, "Status Hukum Wilayah Yerusalem Akibat Pemindahan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat Dari Tell Aviv," (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), hal.62.

Serikat di Jerusalem, menempati Gedung dalam kompleks Konsulat Jenderal AS di daerah Jerusalem Barat tepatnya di Arnona[26].

Pemindahan kedutaan besar dan pengakuan Jerusalem sebagai ibukota Israel merupakan janji kampanye Donald Trump pada tahun 2016 yang telah terealisasikan. Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat telah sangat bertentangan dari prinsip *two state solution* yang disepakati oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB yang telah disahkan sejak tahun 1948 [27].

Hal tersebut akan merusak proses perundingan perdamaian di Timur Tengah secara umum lalu proses perdamaian Israel dan Palestina. Selain bertentangan dengan prinsip *two state solution,* tindakan yang dilakukan Amerika Serikat juga mengganggu *status quo* dari Jerusalem, masyarakat internasional dan seluruh resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB telah menegaskan kalau status dan batas Jerusalem yang diklaim kedua negara akan terus menjadi subjek dari perundingan antara Israel dan Palestina.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan oleh penulis, dapat diidentifikasikan beberapa masalah yaitu kebijakan sepihak Amerika Serikat dalam masa pemerintahan Donald Trump, tindakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat yang bertentangan dengan prinsip solusi dua

[26] Rasdiyanah Thahir, "Konflik Israel-Palestina Dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Diplomasi (Telaah Hukum Islam Dan Pendekatan Dalam Hubungan Internasional)," 2017.hal:24-25

[27] Atep Abdurofiq, "Respon Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Israel Atas Palestina,", (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), hal.72-75.

negara yang disepakati oleh PBB lalu hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel.

Setelah terdapat tiga identifikasi makalah, melahirkan satu permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini yaitu Kebijakan Sepihak Amerika Serikat dalam Pemerintahan Donald Trump

Dari identifikasi masalah dan masalah pokok, terbentuk sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : **" Bagaimana Kebijakan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump terkait pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Jerusalem pada tahun 2017-2018 ?"**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara deskriptif bagaimana proses presiden Donald Trump mengeluarkan keputusan sepihaknya untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalem. Penelitian ini juga akan fokus pada tahun 2017 hingga tahun 2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan pembaca mengenai keputusan Presiden Donald Trump yang memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Jerusalem ke Tel Aviv. Selain itu penulis berharap agar penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai luasnya jangkauan hubungan Amerika Serikat dengan Israel yang berdampak pada banyak hal terutama kawasan Timur Tengah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis dengan sistematika penulisan yang akan dibagi kedalam lima (5) bagian yang terlampir :

BAB 1 adalah bagian muka terdapat sampul depan serta halaman daftar isi, lalu bagian kedua terdapat merupakan bagian isi dari penelitian yang berisi 3 bab yaitu bab pertama didalamnya terdapat latar belakang permasalahan, lalu rumusan masalah yang akan dipaparkan oleh penulis lalu tujuan dan kegunaan penulisan penelitian ini.

BAB II membahas tentang kajian pustaka yang akan membahas penelitian terdahulu yang relevan oleh penelitian yang diambil oleh peneliti, lalu terdapat kerangka teori utama dan pendukung untuk mendukung fakta dari isi penelitian dan yang terakhir adalah kerangka pemikiran yang akan dibuat atas esensi dari setiap hasil yang diperoleh dari penelitian literatur berupa konsep yang akan membentuk menjadi kerangka pemikiran.

BAB III adalah bab ketiga yaitu metode dari penelitian ini yang akan menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, Teknik pengumpulan data serta setelah seluruh data dikumpulkan akan diolah melalui Teknik pengolahan data.

BAB IV merupakan bab Analisis Kebijakan atas Pemindahan Kantor Kedutaan Besar dari Tel Aviv ke Jerusalem oleh Amerika. Pada bab ini akan membahas tentang gambaran umum dari masing-masing materi sebelum akan membahas hasil Analisa. Pada bab 4 terbagi dalam 3 bagian penting untuk di analisis yaitu hubungan Israel dan Amerika Serikat, relokasi kantor kedutaan

besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Jerusalem tahun 2017-2018 dan yang terakhir kebijakan sepihak Amerika Serikat atas pemindahan kantor kedutaannya ke Jerusalem. Hasil analisis ini diperkuat dengan literatur berupa konsep-konsep yang telah dijelaskan pada BAB II

BAB V adalah bab terakhir sekaligus penutup yang diringkas dengan kesimpulan yang berisi jawaban dari permasalahan yang disusun.

UNIVERSITAS NASIONAL